

PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN MUTU LAYANAN PEMBELAJARAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Oleh:

Siti Saniyyah Sholihat

Program Studi Administrasi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana

(email: siti.saniyyah@student.upi.edu)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum optimalnya layanan pembelajaran yang diterima siswa. Hal ini terlihat dari kondisi empirik diantaranya sebagian guru yang menggunakan sarana pembelajaran berbasis IT, umpan balik siswa dalam kegiatan pembelajaran belum optimal, kondisi ruang kelas rusak ringan, dan hasil belajar siswa cukup tinggi. Tujuan penelitian adalah teranalisisnya pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Mutu layanan pembelajaran sebagai hasil dari kinerja guru profesional sehingga tercipta kepuasan belajar siswa. Sampel penelitian berjumlah 143 partisipan, terdiri dari 30 kepala madrasah, 30 ketua komite madrasah, dan 83 guru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengelolaan Biaya Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung berkategori sangat tinggi, 2) Partisipasi Masyarakat pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung berkategori tinggi, 3) Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung berkategori sangat tinggi, 4) Pengelolaan Biaya Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Mutu Layanan Pembelajaran dan berkategori cukup kuat, 5) Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Mutu Layanan Pembelajaran dan berkategori rendah, 6) Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Mutu Layanan Pembelajaran dan berkategori cukup kuat.

Kata kunci: Mutu Layanan, Biaya Pendidikan, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This research was motivated by learning services that student received is not optimal. This is evident from the empirical conditions including some teachers who use IT-based learning tools, the student feedback in learning activities not optimal, lightly damaged classrooms, and student learning outcomes is quite high. The research objective is unanalyzed influence Management of Cost Education and Community Participation on Quality of Learning Service at Private Elementary Madrasah in Bandung City. Quality of learning service as a result of the performance professional teachers to create satisfaction of student learning. These samples included 143 participants, consisting of 30 headmaster, 30 chairman of the school committee, and 83 teachers. The method used is descriptive-survey with quantitative approach. The results showed 1) Management of Cost Education at Private Elementary Madrasah in Bandung City categorized very high, 2) Community Participation in Private Elementary Madrasah in Bandung City categorized high, 3) Quality of Learning Service at Private Elementary Madrasah in Bandung City categorized very high, 4) Management of Cost Education positive and significant influence on Quality of Learning Service and categorized quite strong, 5) Community Participation no significant influence on Quality of Learning Service and categorized low, 6) Management of Cost Education and Community Participation no significant influence on Quality of Learning Service and categorized strong enough.

Keywords: Quality Service, Cost Education, Community Participation

PENDAHULUAN

Direktorat Pendidikan Madrasah (2007, hlm. 75), mengemukakan dalam upaya meningkatkan mutu madrasah perlu dilakukan pembenahan-pembenahan baik fisik maupun non fisik. Pembenahan fisik salah satunya dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat dan yayasan-yayasan swasta. Sedangkan dalam hal non fisik diantaranya kurikulum, strategi belajar

mengajar, kualitas tenaga pengajar dan manajemen madrasah. Selain itu, upaya peningkatan mutu madrasah dapat dilakukan dengan cara mengembangkan jaringan (*networking*) madrasah tersebut. Di era teknologi yang semakin modern saat ini, jaringan merupakan kebutuhan dan memiliki peranan sangat penting, dimana jaringan sebagai modal

penting dalam persaingan, selain modal kapital juga sumberdaya (alam dan manusia) yang dimiliki madrasah.

Mutu layanan di madrasah dapat terlihat selama proses pembelajaran berlangsung dan hasil belajar siswa. Mutu layanan pembelajaran diartikan sebagai kualitas layanan dalam pembelajaran yang diperoleh siswa meliputi mutu mengajar guru, kelancaran layanan, umpan balik, layanan keseharian, kenyamanan ruang kelas, dan hasil belajar. Pengukuran terhadap mutu layanan pembelajaran sebagai elemen penting dalam menyediakan layanan pembelajaran secara optimal, tentunya lebih baik, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, mutu layanan pembelajaran harus dimulai dari kebutuhan siswa sebagai konsumen dan akhirnya terbentuk persepsi mereka terhadap mutu layanan pembelajaran yang telah diberikan madrasah.

Kondisi empirik mutu layanan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung, diantaranya sebagian guru jarang menggunakan sarana pembelajaran berbasis informasi teknologi (IT) seperti video dan audio, padahal penggunaan informasi teknologi (IT) saat ini memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran aktif, inovatif, komunikatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM). Umpan balik siswa dalam kegiatan pembelajaran belum optimal, kurang nyamannya ruang kelas (kondisi ruang kelas rusak ringan), dan hasil belajar siswa cukup tinggi (prestasi akademik).

Pengelolaan biaya pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung memerlukan peningkatan pada dimensi evaluasi, terutama kurangnya peran orangtua siswa dan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan biaya pendidikan di madrasah. Hal ini sebagai salah satu upaya orangtua dan masyarakat dalam mengontrol sejauh mana pengelolaan biaya pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan/atau dana orangtua siswa dapat berjalan efektif dan efisien. Sehingga pengelolaan tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran di madrasah.

Partisipasi masyarakat melalui komite madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung memerlukan peningkatan pada dimensi pendukung, terutama kurang aktifnya peran komite madrasah dalam memantau kondisi sarana dan prasarana, memobilisasi bantuan sarana dan prasarana, dan memantau kondisi anggaran pendidikan di madrasah. Ketersediaan fasilitas yang memadai dan kondisi anggaran pendidikan di madrasah, tentunya akan berdampak pada layanan pembelajaran yang diterima siswa.

Brady dan Cronin (2001), tiga dimensi utama kualitas layanan diantaranya kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, dan kualitas hasil. Setiap dimensi utama tersebut memiliki tiga subdimensi, yaitu kualitas interaksi (sikap, perilaku, keahlian), kualitas lingkungan fisik (kondisi lingkungan sekitar, desain, faktor sosial), dan kualitas hasil (waktu pelayanan, bukti fisik/*tangibles*, valensi). Kesembilan subdimensi tersebut terdiri dari *reliability item*, *responsiveness item* dan *empathy item*.

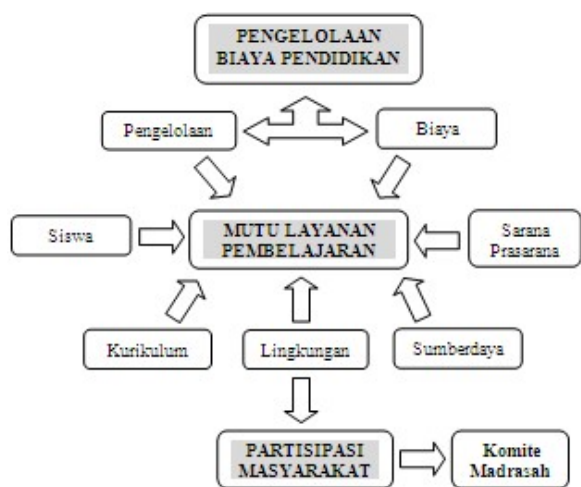
Kurniady (2011), dalam penelitian berjudul "Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung", salah satu hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh adalah model pengelolaan pembiayaan SD berdasarkan kebutuhan belajar, memfokuskan pada pendistribusian dan pengalokasian dana berdasarkan program atau kegiatan yang menjadi prioritas, dengan pendekatan penghitungan alokasi dana menggunakan *activity based costing*, supaya efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dapat tercapai, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

Hasil penelitian Siregar (2009) mengenai "Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Pembelajaran" diperlukan adanya peran kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu layanan pembelajaran, diantaranya (1) mengelola sarana dan prasarana, (2) membina, membimbing dan memotivasi bawahannya, dan (3) menerapkan kurikulum. Selain itu, hasil penelitian Suryono, dkk. (2013), mengenai "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 terhadap Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah", menyatakan bahwa pemberdayaan komite sekolah, dimana (1) fungsi dan tugas komite sekolah baru pada penyusunan dan pengesahan RAPBS, (2) komite sekolah, kepala sekolah dan guru tidak menghendaki keterlibatan komite sekolah dalam masalah kebijakan teknis pendidikan di sekolah, (3) komite sekolah dengan sekolah belum memiliki sistem kemitraan hubungan kerja yang jelas, (4) tidak tersedianya anggaran komite sekolah, dan (5) keterbatasan sumberdaya manusia komite sekolah.

Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan pengelolaan biaya pendidikan yang efektif dan efisien, dimana madrasah memberikan prioritas pada kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Partisipasi masyarakat dapat diikuti langsung oleh warga masyarakat maupun melalui lembaga seperti komite madrasah. Komite madrasah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan

prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kedua hal tersebut tentunya dapat mendukung terciptanya mutu layanan pembelajaran yang lebih optimal dan berdampak pada meningkatnya pencapaian hasil belajar siswa sebagai *output* pendidikan di madrasah.

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang penelitian, adalah belum optimalnya layanan pembelajaran yang diterima siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini terlihat dari kondisi empirik, hasil akreditasi dan hasil UN sebagai indikator-indikator yang menentukan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di madrasah.



Gambar1. Identifikasi Masalah

Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu layanan pembelajaran diantaranya biaya, sarana prasarana, sumberdaya, lingkungan, kurikulum, siswa, dan pengelolaan. Penelitian ini berfokus pada tiga faktor, yaitu pengelolaan, biaya, dan lingkungan. Faktor pengelolaan dan biaya menjadi variabel X1, yaitu Pengelolaan Biaya Pendidikan dan faktor lingkungan menjadi

variabel X2, yaitu Partisipasi Masyarakat melalui Komite Madrasah.

Ketersediaan biaya untuk sarana prasarana madrasah sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM). Ketersediaan sarana prasarana akan tergantung pada dana yang ada, sehingga madrasah perlu melakukan pengelolaan biaya operasional secara efektif dan efisien. Keadaan madrasah yang memadai adalah madrasah yang didukung fasilitas laboratorium, perpustakaan dan fasilitas lainnya yang mendukung dalam pengembangan minat serta bakat siswa dan lokasinya terletak pada daerah yang sangat strategis dan lingkungan yang nyaman.

Pemahaman paradigmatik bagi komunitas pendidikan, baik dari sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan dan komite sekolah memiliki urgensi tinggi, mengingat keberadaan dewan pendidikan dan komite sekolah dalam kurun waktu yang panjang tidak memiliki fungsi dan tugas yang berarti bagi penentuan kebijakan pendidikan, sehingga berbagai kebijakan pendidikan hanya dibuat oleh internal dari komunitas pendidikan itu sendiri, mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan sekolah (Siskandar, 2008, hlm. 5). Komite madrasah dapat dilibatkan dalam proses pembelajaran di madrasah, hal ini berkaitan dengan kesempatan yang dimiliki oleh komite madrasah dalam memahami dinamika masyarakat, sehingga madrasah mampu membuat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-survei dengan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini melakukan penyelidikan bersifat alami dan bukan buatan untuk menggambarkan sesuatu, memperoleh fakta, mencari keterangan secara faktual, membedah dan mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran mengenai pengaruh pengelolaan biaya pendidikan dan partisipasi masyarakat terhadap mutu layanan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala madrasah, ketua komite madrasah dan guru pada 66 Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung, terdiri dari 66 kepala madrasah, 66 ketua komite madrasah, dan 914 guru. Jumlah sampel dalam penelitian ini, yaitu 143 partisipan, terdiri dari 30 kepala madrasah, 30 ketua komite madrasah, dan 83 guru.

Instrumen penelitian berupa tiga bentuk angket/kuesioner yang terdiri dari pengelolaan biaya pendidikan, partisipasi masyarakat dan mutu layanan pembelajaran. Instrumen penelitian tersebut diberikan kepada sampel penelitian yaitu

kepala madrasah, ketua komite madrasah dan guru pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber sekunder berupa dokumen data Kemenag Kota Bandung dan riset terdahulu mengenai mutu layanan pembelajaran. Sumber primer berupa kuesioner kolektif yang diberikan kepada partisipan kepala madrasah, ketua komite madrasah, dan guru. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan langkah-langkah penelitian berikut:

- Peneliti mengajukan permohonan surat izin penelitian dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa dokumen data akreditasi madrasah dan *Education Management Information System* pada tahun 2015-2016 semester 1 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
- Peneliti mengumpulkan data primer dengan menyebarkan angket/kuesioner secara kolektif kepada partisipan kepala madrasah, ketua komite madrasah dan guru. Pengisian kuesioner oleh guru MIS Zakaria 1 diperoleh dari 2 orang, dari jumlah sampel 11 orang. Hal ini dikarenakan guru yang keberterangan untuk mengisi kuesioner tersebut.

- Peneliti mengolah dan menganalisis data sekunder dan data primer yang telah terkumpul sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan teknik Analisis Deskriptif (*WMS-Weighted Means Scored*). Analisis data deskriptif perlu dilakukan untuk menggambarkan rata-rata kecenderungan jawaban responden/partisipan pada masing-masing variabel. Selain itu, analisis data deskriptif dilakukan untuk mengetahui penafsiran skor tertinggi dan terendah pada setiap variabel. Peneliti menggunakan teknik WMS (*Weighted Means Scored*) dari Furqon (2011, hlm. 42) dengan rumus berikut:

$$X = \frac{\sum X}{N} \quad (1)$$

Dimana X: skor rata-rata yang dicari, $\sum X$: Jumlah skor gabungan (hasil kali frekuensi dengan bobot nilai untuk setiap alternatif jawaban), dan N: Jumlah Responden.

Pengujian Hipotesis, dilakukan melalui Uji Normalitas Data, Uji Linearitas Data, dan Uji Hipotesis. Teknik yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis adalah: (a) Hipotesis 1 dan 2 diuji dengan menggunakan teknik korelasi dan regresi sederhana; (b) Hipotesis 3 diuji dengan menggunakan teknik korelasi dan regresi ganda.

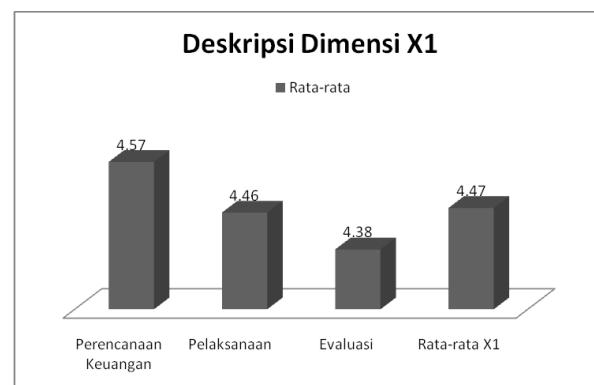
HASIL PENELITIAN

Deskripsi hasil penelitian berupa analisis data deskriptif yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kecenderungan penyebaran data pada masing-masing variabel Pengelolaan Biaya Pendidikan (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Mutu Layanan Pembelajaran (Y) yang diperoleh dari 30 Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Pengolahan data menggunakan teknik WMS (*Weighted Means Scored*), dimana hasilnya akan menampilkan nilai rata-rata kecenderungan jawaban partisipan, yaitu 30 kepala madrasah, 30 ketua komite madrasah dan 83 guru.

Tabel 1. Daftar Konsultasi WMS

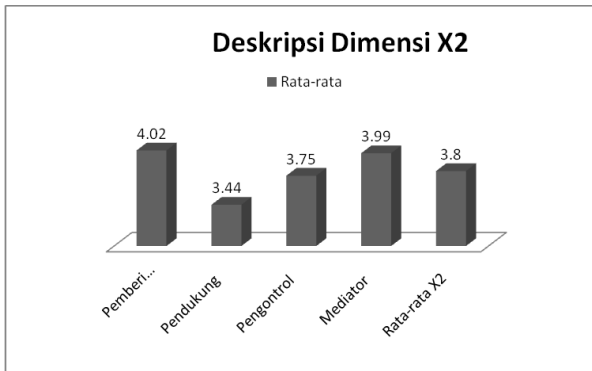
Rentang Nilai	Kriteria	Penafsiran Variabel X1, X2, Y
4,01-5,00	Sangat Tinggi	SL (Selalu)
3,01-4,00	Tinggi	S (Sering)
2,01-3,00	Sedang	KD (Kadang-kadang)
1,01-2,00	Rendah	JR (Jarang)
0,01-1,00	Sangat Rendah	TP (Tidak Pernah)

Pengelolaan Biaya Pendidikan (X1) pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung memiliki nilai rata-rata 4.47 dengan kategori tinggi. Hal ini merupakan akumulasi nilai rata-rata dari tiga dimensi, yaitu perencanaan keuangan (4.57), pelaksanaan (4.46), dan evaluasi (4.38).



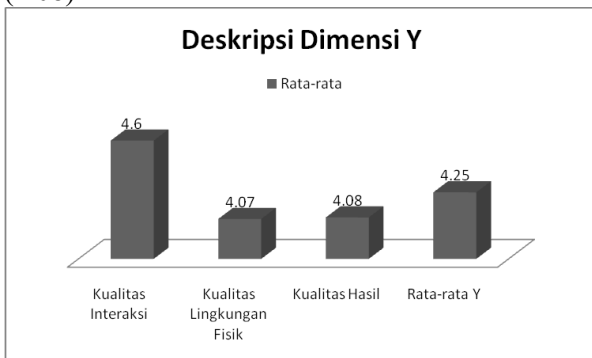
Gambar 2. Deskripsi Dimensi X1

Partisipasi Masyarakat (X2) melalui Komite Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung memiliki nilai rata-rata 3.8 dengan kategori cukup tinggi. Hal ini merupakan akumulasi nilai rata-rata dari empat dimensi, yaitu pemberi pertimbangan (4.02), pendukung (3.44), pengontrol (3.75), dan mediator (3.99).



Gambar 3. Deskripsi Dimensi X2

Mutu Layanan Pembelajaran (Y) pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung memiliki nilai rata-rata 4.25 dengan kategori tinggi. Hal ini merupakan akumulasi nilai rata-rata dari tiga dimensi, yaitu kualitas interaksi (4.6), kualitas lingkungan fisik (4.07), dan kualitas hasil (4.08).



Gambar 4. Deskripsi Dimensi Y

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui uji analisis korelasi dan regresi, baik secara sederhana maupun ganda, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y, X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, serta X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Adapun besarnya pengaruh variabel X1, X2 dan Y sebagai berikut:

- Besarnya pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan terhadap Mutu Layanan Pembelajaran adalah sebesar 17.14%, sedangkan sisanya sebesar 82,86% dipengaruhi oleh faktor lain.
- Besarnya pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran adalah sebesar 9.92%, sedangkan sisanya sebesar 90.08% dipengaruhi oleh faktor lain.
- Besarnya pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap mutu layanan pembelajaran adalah sebesar 19.27%, sedangkan sisanya sebesar 80.73% dipengaruhi oleh faktor lain.

Besarnya pengaruh Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran, baik secara parsial dan simultan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Variabel	Koefisien Korelasi (R)	Nilai Persamaan Regresi	Nilai F	Koefisien Determinasi	Variabel lain (e)
X1-Y	0.414	$Y = 2.902 + 0.336 X1$		17.14%	82.86%
X2-Y	0.315	$Y = 3.953 + 0.119 X1$		9.92%	90.08%
X1,X2-Y	0.439	$Y = 2.930 + 0.277X1 + 0.062 X2$	3.231	19.27%	80.73%

PEMBAHASAN

Pengelolaan biaya pendidikan memiliki tiga dimensi, dimana setiap dimensi tersebut

memiliki satu indikator, yaitu perencanaan keuangan dengan indikator ketetapan dalam

alokasi penerimaan dan pengeluaran, pelaksanaan dengan indikator kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan evaluasi dengan indikator adanya tindakan korektif terhadap pelaksanaan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi perencanaan keuangan dengan indikator ketetapan dalam alokasi penerimaan dan pengeluaran, dikatakan sudah berjalan/dilaksanakan dengan kualitas sangat baik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 4.57. Apabila dibandingkan dengan dimensi lain, perencanaan keuangan menjadi prioritas kesatu dalam pengelolaan biaya pendidikan di madrasah.

Dimensi pelaksanaan dengan indikator kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, dikatakan sudah berjalan/dilaksanakan dengan kualitas sangat baik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 4.46. Apabila dibandingkan dengan dimensi lain, pelaksanaan menjadi prioritas kedua dalam pengelolaan biaya pendidikan di madrasah.

Dimensi evaluasi dengan indikator adanya tindakan korektif terhadap pelaksanaan pembiayaan, dikatakan sudah berjalan/dilaksanakan dengan kualitas sangat baik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 4.38. Apabila dibandingkan dengan dimensi lain, evaluasi menjadi prioritas ketiga dalam pengelolaan biaya pendidikan di madrasah.

Keterlibatan orangtua sebagai bentuk peran serta masyarakat dibentuk dalam wadah komite dan dewan pendidikan (Rahman, 2012). Partisipasi masyarakat melalui komite madrasah memiliki empat dimensi, yaitu pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator. Dimensi pemberi pertimbangan dengan 10 indikator, dikatakan sudah berjalan/dilaksanakan dengan kualitas sangat baik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 4.02. Apabila dibandingkan dengan dimensi lain, pemberi pertimbangan menjadi prioritas kesatu dalam partisipasi masyarakat melalui komite madrasah.

Dimensi pendukung dengan 9 indikator, dikatakan sudah berjalan/dilaksanakan dengan kualitas baik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 3.44. Apabila dibandingkan dengan dimensi lain, pendukung menjadi prioritas keempat dalam partisipasi masyarakat melalui komite madrasah.

Dimensi pengontrol dengan 14 indikator, dikatakan sudah berjalan/dilaksanakan dengan kualitas baik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 3.75. Apabila dibandingkan dengan dimensi lain, pengontrol menjadi prioritas ketiga dalam partisipasi masyarakat melalui komite madrasah.

Dimensi mediator dengan 7 indikator, dikatakan sudah berjalan/dilaksanakan dengan kualitas baik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 3.99. Apabila dibandingkan dengan dimensi lain, kualitas hasil menjadi prioritas kedua dalam partisipasi masyarakat melalui komite madrasah.

Mutu layanan merupakan elemen penting dalam tercapainya pengelolaan pendidikan yang bermutu. Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagai penyedia jasa dihadapkan dengan tuntutan harus mampu memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan jasa pendidikan. Sehingga dengan layanan prima tersebut diharapkan pelanggan akan merasa puas. Layanan prima yang diberikan tentunya dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa sebagai pelanggan internal di madrasah. Sebagaimana yang dikemukakan Palli dan Mamilla (2012, hlm. 430), kualitas pelayanan merupakan penilaian pelanggan/klien mengenai kinerja keseluruhan layanan dari organisasi dan layanannya:

“Service quality is judgement of customers/clients regarding overall performance of a service of the organization and its services”

Penelitian tentang mutu layanan pembelajaran ini dilakukan pada 30 Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung, dengan partisipan 83 guru. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi yang menunjukkan bahwa mutu layanan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung berkategori sangat tinggi. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan rata-rata sebesar 4.25. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa layanan pembelajaran pada MIS di Kota Bandung sudah mengacu pada standar mutu layanan yang telah ditetapkan.

Mutu layanan pembelajaran, merujuk pada konsep mutu layanan Brady dan Cronin (2001), dimana terdapat tiga dimensi utama diantaranya kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik dan kualitas hasil. Setiap dimensi utama tersebut memiliki tiga indikator, yaitu kualitas interaksi (sikap, perilaku,

keahlian), kualitas lingkungan fisik (kondisi lingkungan sekitar, desain, faktor sosial) dan kualitas hasil (waktu pelayanan, bukti fisik/*tangibles*, valensi).

Dimensi kualitas interaksi memiliki indikator sikap, perilaku dan keahlian. Ketiga indikator tersebut dikatakan sudah berjalan/dilaksanakan dengan kualitas sangat baik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebesar 4.6. Apabila dibandingkan dengan dimensi lain, kualitas interaksi menjadi prioritas kesatu dalam proses mutu layanan pembelajaran kepada siswa madrasah.

Dimensi kualitas lingkungan fisik memiliki indikator kondisi lingkungan sekitar, desain dan faktor sosial. Ketiga indikator tersebut dikatakan sudah berjalan/dilaksanakan dengan kualitas sangat baik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana diperoleh nilai rata-rata sebesar 4.07. Apabila dibandingkan dengan dimensi lain, kualitas lingkungan fisik menjadi prioritas ketiga dalam proses mutu layanan pembelajaran kepada siswa madrasah.

Dimensi kualitas hasil memiliki indikator waktu pelayanan, bukti fisik (*tangibles*) dan valensi. Ketiga indikator tersebut dikatakan sudah berjalan/dilaksanakan dengan kualitas sangat baik pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana diperoleh nilai rata-rata sebesar 4.08. Apabila dibandingkan dengan dimensi lain, kualitas hasil menjadi prioritas kedua dalam proses mutu layanan pembelajaran kepada siswa madrasah.

Mutsotso dan Abenga (2010, hlm. 811), merekomendasikan beberapa hal untuk mencapai layanan pembelajaran yang berkualitas sebagai berikut:

(1) *Institutions of higher learning make effort in putting in place structures that can facilitate the application of the distributed learning approach to studying.* (2) *Institutions be encouraged to infuse and initiate within first year, first semester orientation, tuition and advisory services the aspect of effective and efficient study methods for a university student.* (3) *Establish, enhance and encourage academic advisory services by faculty in a manageable student: staff ratio to enable diagnosis and guidance of students in academic study related issues.* (4) *Put in place mechanisms to encourage, enhance and develop academic staff's study and advisory skills. This can be done through staff induction*

seminars, workshops, peer mentoring and much more.

Dengan kata lain, (1) Madrasah menciptakan strukturisasi yang akan memfasilitasi penerapan pendekatan pembelajaran dalam belajar, (2) Madrasah mendukung setiap aspek metode belajar yang efektif dan efisien untuk siswa, (3) Membangun, meningkatkan dan mendorong layanan konsultasi akademik: rasio staf untuk mengaktifkan diagnosis dan bimbingan siswa di bidang akademik terkait isu-isu. (4) Mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan belajar staf akademis dan keterampilan sebagai penasehat.

Berdasarkan analisis data, hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu "Terdapat pengaruh signifikan Pengelolaan Biaya Pendidikan terhadap Mutu Layanan Pembelajaran" diterima. Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian diantaranya, Kurniady (2011), bahwa pendekatan penghitungan alokasi dana menggunakan *activity based costing*, dimana efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dapat tercapai, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yeo (2008, hlm. 159), bahwa upaya peningkatan mutu layanan harus didukung dengan tersedianya fasilitas yang dapat mendukung proses pembelajaran. Fernandes, dkk. (2013, hlm. 624), bahwa fasilitas dan layanan yang diberikan merupakan komponen yang dapat menentukan loyalitas pelanggan. Selain itu, Mahajan, dkk. (2014), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan adalah infrastruktur. Pengelolaan biaya pendidikan yang efektif dan efisien, dimana pada tahap perencanaan keuangan, pelaksanaan dan evaluasi yang menjadi program-program prioritas disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Sehingga ketersediaan fasilitas berupa sarana prasarana pendukung pembelajaran memadai dan berpengaruh positif terhadap kepuasan belajar siswa madrasah.

Hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu "Terdapat pengaruh signifikan antara Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran" ditolak. Beberapa hasil penelitian diantaranya, Sumintono (2009), bahwa institusi pendidikan pada berbagai level, sistem, dan status harus meningkatkan peran komite sekolah/madrasah. Permadi dan Arifin (2010), menyatakan bahwa pelaksanaan peran dan fungsi komite sekolah terutama dalam ikut merancang RAPBS dan merancang program-program sekolah (*advising*) masih lunak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan komite sekolah tentang

hal tersebut. Pelaksanaan fungsi pengawasan (*controlling*) komite sekolah terhadap program-program sekolah masih terbatas pada kegiatan ujian akhir sekolah dan keuangan sekolah. Pengawasan terhadap kegiatan lainnya masih terbatas, mengingat kesibukan dari pengurus komite sekolah. Dalam hal pengumpulan dana (*supporting*) bagi perbaikan sekolah, masih terbatas pada menjangkau dana dari orangtua siswa melalui Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) tahunan dan bulanan. Keterlibatan dunia usaha dan industri terhadap pengumpulan bagi sekolah yang memerlukan masih terbatas di kota-kota yang cukup besar yang ada lokasi industri dan banyak sektor usaha. Komite sekolah sebagai penghubung (*mediator*) dengan pihak luar seperti pada alumni sekolah masih terbatas pada sekolah-sekolah yang cukup besar dan terkenal yang sebagian alumninya sudah mempunyai jabatan-jabatan penting di pemerintahan, angkatan bersenjata, dan perusahaan-perusahaan.

Hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu "Terdapat pengaruh signifikan antara Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Mutu Layanan Pembelajaran" ditolak. Beberapa hasil penelitian diantaranya, Komarudin (2013), bahwa perlunya peningkatan terhadap pengelolaan biaya pendidikan dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi. Somoeun (2014), bahwa komite sekolah/madrasah merupakan keterlibatan orangtua, anggota masyarakat, dan pihak berkepentingan sebagai anggota komite sekolah terpilih yang terlibat

langsung dalam urusan sekolah, dimana menginisiasi, mengadaptasi atau membuat perencanaan dan kebijakan sekolah, melakukan penilaian kebijakan sekolah, menentukan sumberdaya keuangan, menjembatani hubungan antara sekolah dan masyarakat, serta mendesain perencanaan dan evaluasi pendidikan dengan sekolah melalui kesempatan terbuka bagi partisipasi masyarakat untuk mencapai sekolah efektif dan *outcome* siswa.

Cucu (2014), peran komite sekolah/madrasah sangat diharapkan guna peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, apalagi dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Peningkatan kinerja komite sekolah dapat diupayakan dengan mengoptimalkan peran dari setiap anggota komite sekolah, keterlibatan semua unsur dalam organisasi komite sekolah serta pembagian tugas yang sesuai dengan kapasitas personil akan mampu meningkatkan kinerja komite sekolah.

Chong dan Ahmed (2014), peran institusi penyedia jasa, dimana mutu layanan (*service quality*) yang harus dipenuhi mencakup tiga komponen, yaitu: belajar mengajar (*teaching and learning*) berhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah, administrasi (*administration*) berhubungan dengan segala kebutuhan administrasi, dan fasilitas (*facilities*) berhubungan dengan pemenuhan segala sarana prasarana yang dapat menunjang efektivitas pembelajaran siswa.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengelolaan biaya pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung secara keseluruhan rata-rata berada pada kategori sangat tinggi. Apabila melihat ketiga dimensi pengelolaan biaya pendidikan, maka dimensi yang paling tinggi adalah perencanaan keuangan dengan indikator ketetapan dalam alokasi penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan dimensi yang paling rendah adalah evaluasi dengan indikator adanya tindakan korektif terhadap pelaksanaan pembiayaan.

Partisipasi masyarakat melalui komite madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung secara keseluruhan rata-rata berada pada kategori tinggi. Apabila melihat keempat dimensi komite madrasah, maka dimensi yang paling tinggi adalah pemberi pertimbangan dengan indikator identifikasi sumberdaya pendidikan dalam masyarakat, memberikan masukan dalam penyusunan RKAS, ikut mengesahkan RKAS bersama kepala madrasah

dan memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan. Sedangkan dimensi yang paling rendah adalah pendukung dengan indikator memobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di madrasah dan memobilisasi tenaga kependidikan (bukan guru) untuk mengisi kekurangan di madrasah.

Mutu layanan pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung secara keseluruhan rata-rata berada pada kategori sangat tinggi. Apabila melihat ketiga dimensi mutu layanan pembelajaran, maka dimensi yang paling tinggi adalah kualitas interaksi dengan indikator sikap, perilaku, dan keahlian. Sedangkan dimensi yang paling rendah adalah kualitas lingkungan fisik dengan indikator kondisi lingkungan sekitar, desain, dan faktor sosial.

Pengelolaan Biaya Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung dan pengaruhnya

tergolong cukup kuat. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung dan pengaruhnya tergolong rendah. Pengelolaan Biaya Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Mutu Layanan Pembelajaran pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kota Bandung dan pengaruhnya tergolong cukup kuat.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, maka implikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan biaya pendidikan oleh kepala madrasah menfokuskan pada pemilihan program-program prioritas dalam mendukung peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar (akademik dan non akademik) yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa madrasah.
2. Komite madrasah dapat berperan aktif sebagai kontributor dalam pengadaan fasilitas berupa sarana prasarana pembelajaran berbasis Informasi Teknologi (IT) di madrasah. Sehingga apabila layanan pembelajaran optimal, disesuaikan dengan kebutuhan belajar, maka akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang diterima siswa.
3. Layanan pembelajaran yang diberikan guru kepada siswa berorientasi pada kualitas interaksi, dimana kinerja guru profesional sangat diperlukan dalam peningkatan mutu layanan pembelajaran di madrasah.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan biaya pendidikan, dimensi yang paling rendah adalah evaluasi dengan indikator adanya tindakan korektif terhadap pelaksanaan pembiayaan. Agar hal tersebut dapat meningkat, maka evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan rutin mulai dari perencanaan keuangan, pelaksanaan dan evaluasi.
 - a. Kegiatan evaluasi dengan menyusun prioritas terhadap program-program pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar siswa.

- b. Kepala madrasah mengawasi setiap pelaksanaan program-program madrasah agar sesuai dengan perencanaan keuangan.

- c. Pengelolaan biaya pendidikan harus transparan, dimana kepala madrasah bekerja sama dengan guru dan tenaga kependidikan dalam mengevaluasi setiap penerimaan dan pengeluaran biaya pendidikan di madrasah. Madrasah pun perlu melibatkan orangtua siswa dan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan biaya pendidikan.

2. Partisipasi masyarakat melalui komite madrasah, dimensi yang paling rendah adalah pendukung. Agar dimensi tersebut dapat meningkat, maka komite sekolah harus berperan aktif dalam mendukung setiap program-program madrasah, terutama dalam kegiatan pembelajaran.

- a. Komite madrasah berperan aktif dalam memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana madrasah, terutama sarana pembelajaran berbasis Informasi Teknologi (IT).

- b. Komite madrasah berperan aktif, bersama dengan kepala madrasah melakukan proses perekrutan dalam menanggulangi kekurangan guru dan tenaga kependidikan.

3. Mutu layanan pembelajaran, dimensi yang paling rendah adalah kualitas lingkungan fisik dengan indikator kondisi lingkungan sekitar, desain dan faktor sosial. Agar dimensi tersebut dapat meningkat, maka beberapa hal yang penulis rekomendasikan, diantaranya:

- a. Kondisi lingkungan alamiah sekitar madrasah dapat dijadikan pendukung kegiatan pembelajaran, misalnya guru mengajak siswa belajar di luar kelas (*outdoor activity*).

- b. Hubungan harmonis siswa dengan keluarga dapat dipantau pihak madrasah melalui peran aktif Bimbingan Konseling (BK), sehingga siswa lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajar di madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

Brady dan Cronin. (2001). Some New Thoughts on Conceptualizing Perceived Service Quality: A Hierarchical Approach. *The Journal of Marketing*, Vol. 65, No. 3 (Jul 2001), pp. 34-49.

Chong, S. Y. dan Ahmed, P. (2014). A Phenomenology of University Service Quality Experience. *International Journal of Educational Management*. Vol. 28. (1), 36-52.

- Cucu. (2014). *Kontribusi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Kinerja Komite Sekolah terhadap Efektivitas Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka*. Tesis Administrasi Pendidikan UPI Bandung.
- Direktorat Pendidikan Madrasah. (2007). *Perkembangan Madrasah dalam Editorial*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Fernandes, C. dkk. (2013). Understanding Student Satisfaction and Loyalty in the UAE HE Sector. *International Journal of Educational Management*, Vol. 27. (6), 613-630.
- Furqon. (2011). *Statistik Terapan untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Komarudin, Deni. (2013). *Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah Dasar (Studi Deskriptif tentang Pengaruh Kinerja Kepala Sekolah dan Kinerja Komite Sekolah terhadap Efektivitas Manajemen Pembiayaan Sekolah pada SDN Se-Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat)*. Tesis Administrasi Pendidikan UPI Bandung.
- Kurniady, Dedy Achmad. (2011). Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung. *Jurnal Penelitian Pendidikan* Vol.12 No. 1, 36-37.
- Mahajan, R. dkk. (2014). Factors Affecting Quality of Management Education in India. *International Journal of Educational Management*, Vol. 28. (4), 379-399.
- Mutsotso, S. N. dan Abenga, E. S. B. (2010). Study Methods for Improving Quality Learning and Performance in Higher Education. *Educational Research and Review Academic Journals* Vol. 5 (12), pp. 808-813.
- Palli, G. J. dan Mamilla, R. (2012). Students Opinions of Service Quality in the Field of Higher Education. *Journal of Scientific Research*, Vol. 3. (4), 430-438.
- Permadi, D dan Arifin, D. (2010). *Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Komite Sekolah*. Bandung: Sarana Panca Karya Nusa.
- Rahman, K.A. (2012). Peningkatan Mutu Madrasah melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume I, Nomor 2, Desember 2012/1434.
- Siregar, Darwin. (2009). *Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Upaya-upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pembelajaran di SMA Negeri 4 Medan)*. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan.
- Siskandar. (2008). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol 14 No.37 Hlm. 5.
- Somoeun, Mut. (2014). *The Influence of Principal Leadership and Engagement of School Committee toward the Effectiveness of Implementing School-Based Management*. Tesis Administrasi Pendidikan UPI Bandung.
- Sumintono, Bambang. (2009). School-Based Management Policy and Its Practices at District Level in the Post New Order Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, 2009, pp. 41-67. University of Technology Malaysia.
- Suryono, Arief, Rahmad Santosa dan Haryadi. (2013). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 terhadap Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013.
- Yeo, R. K. (2008). Servicing Service Quality in Higher Education: Quest of Excellence. *On the Horizon*, Vol. 16. (3), 152-161.